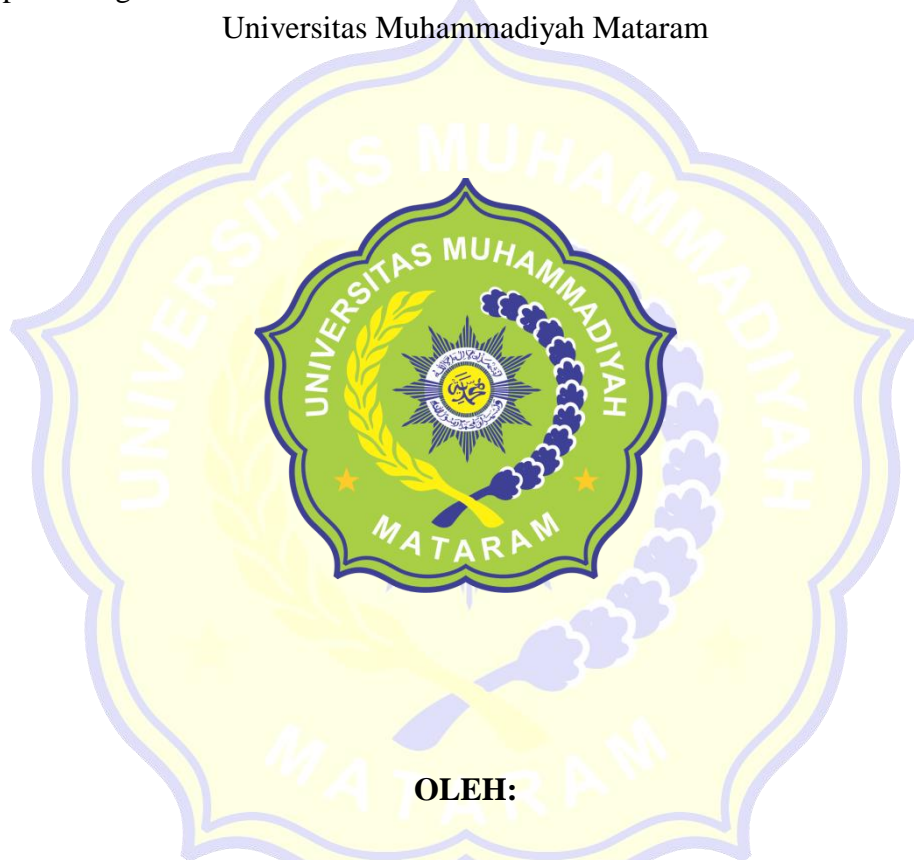


SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERKEMBANGAN
PARIWISATA DI KAWASAN SENGGIGI KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Strata Satu (S-1)
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

AHMAD FITRA BAITI RAHMAN

2019B1D064

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERKEMBANGAN
PARIWISATA DI KAWASAN SENGGIGI KABUPATEN
LOMBOK BARAT**



Oleh :

AHMAD FITRA BAITI RAHMAN
2019B1D064

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi

Tanggal, 18 Juli 2023

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Drs. Amil., MM
NIDN. 0831126204

Dosen Pembimbing II

Ilham Zetri, S.IP., M.IP
NIDN. 0817119102

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Yudhi Estanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

HALAMAN PENGESAHAN

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERKEMBANGAN
PARIWISATA DI KAWASAN SENGGIGI KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

Oleh :

AHMAD FITRA BAITI RAHMAN
2019B1D064

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 18 Juli 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji:

1. **Drs. Amil., MM** (PU) (.....) 
NIDN. 0831126204
2. **Ilham Zitri, S.IP., M.IP** (PP) (.....) 
NIDN. 0817119102
3. **Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.IP** (PN) (.....) 
NIDN. 0825118501

Mengetahui,

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:
“*Collaborative Governance* dalam Perkembangan Pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat” Ini merupakan karya hasil tulisan asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan Skripsi ini, telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukti bahwa hasil dari karya asli atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 6 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



AHMAD FITRA BAITI RAHMAN
2019B1D064



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fibra Baiq Rahman
NIM : 2019B10064
Tempat/Tgl Lahir : MATARAM, 23 September 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPol
No. Hp : 081237427048
Email : hallopytras@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERKEMBANGAN PARIWISATA
DI KAWASAN SENGAGI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 4 Agustus2023
Penulis



Ahmad Fibra Baiq Rahman
NIM. 2019B10064

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



iskandar, S.Sos.,M.A. udy
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fitra Baiti Rahman
 NIM : 2019310064
 Tempat/Tgl Lahir : MATARAM, 23 September 1997
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : HSIPOL
 No. Hp/Email : 081237427098 / hulkpfitra@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERKEMBANGAN
PARIWISATA DI KAWASAN SENGAGI KABUPATEN LOMBOK
BARAT

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

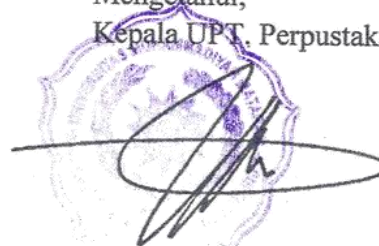
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 4 Agustus 2023
Penulis



Ahmad Fitra Baiti Rahman
NIM. 2019310064

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos..M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Kita bisa karena terbiasa membiasakan diri

فَبَايِ الْأَءِ رَبُّكُمَا تُكْذِبِينَ

Arab latin: Fa bi`ayyi ālā`i rabbikumā tukazzibān

Artinya: "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?"

Jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana

“ bersyukur “



PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini saya persembahkan kepada

1. Kakek, Nenek dan Ibu saya yang berdedikasi paling besar Bapak H. Abdullah Abubakar, Ningyu AR dan Ibu Bima Kuntum Sri Suhada SST., M.Kes yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menjadi penyemangat saya selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Buah hati tercinta, putri pertama “ Qinara Alea Baiti Rahman “ yang menjadi alasan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini
3. Wanita istimewa Mimin Sugiarti S.Pi yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang tinggi kepada saya.
4. Sahrul dore yang selalu menemani dan mengisi waktu saat penyusunan skripsi ini.
5. Paman saya tercinta M. Asri Al-Jannah yang tinggal bersama saya, yang selalu mejadi sayap di saat saya sakit dan menemani saya di saat saya istirahat mengerjakan skripsi ini
6. Kedua sahabat dekat saya Angie Puspita Ningrum dan Megawati Puspita Sari yang menjadi penasihat, pengingat dan pemarah di saat saya lupa waktu dalam mengerjakan skripisi ini,
7. Serta teman-teman saya lainnya Zulfiqri Syahmat S.IP., M.IP, Ikhwansyah SH, Jaswadi dan Meci Rizki Nurhalifah yang selalu memberikan masukan , arahan untuk bisa sampai pada titik ini dan menyelesaikan Skripsi ini.
8. Almamater Hijau tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance dalam Perkembangan Pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat*”. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu pemerintahan (S. IP) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak mungkin terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Amil, M.M Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ilham Zitri, S.IP., M.IP Selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis..

5. Kedua orang tua tercinta H. Abdullah Abu Bakar dan Ninggu Ar serta ibu saya Bima Kuntum Sri Suhada, SST., M.Kes yang telah bersusah payah mendukung penulis dan selalu memberikan motivasi yang tiada hentinya.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, termasuk dalam penulisan skripsi ini baik secara bahasa, penulisan dan materinya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata-katanya yang kurang dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf, penulis akan menerima kritik serta saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan dan referensi.

Mataram, 26 Juni 2023

AHMAD FITRA BAITI RAHMAN

2019B1D064

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERKEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN SENGGIGI KABUPATEN LOMBOK BARAT

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam perkembangan pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Pengembangan suatu tempat wisata dengan pengelolaan sumber daya secara optimal dapat ditunjukkan melalui sinergi yang dibangun antar berbagai stakeholder, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengembangan potensi wisata, maka penting untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang telah dibangun dan faktor apa saja mendorong dan menghambat kolaborasi dari sebuah pengembangan objek wisata.

Metode yang peneliti gunakan yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini dipilih sebab sesuai untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan datanya melalui berbagai bentuk seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari DeSave yang memberikan 7 (tujuh) indikator sebagai alat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dilihat dari: struktur jaringan yang lemah, ditandai dengan belum terlibatnya aktor-aktor terkait. Komitmen terhadap tujuan (belum baik), terlihat dari tidak adanya tujuan bersama dan misi umum yang diciptakan. Tingkat kepercayaan (lemah), dimana kepercayaan yang kuat hanya dibangun antar aktor kolaborasi antar instansi pemerintah. Akses terhadap kekuasaan (cukup baik), dimana Dinas Pariwisata sangat terbuka dan mengetahui kinerja dari aktor kolaborasi lainnya. Pembagian akuntabilitas (cukup baik), dimana setiap aktor kolaborasi sudah memiliki tugas masing-masing. Berbagi informasi (belum optimal), dimana informasi tersebut lebih banyak dibagikan hanya kepada mereka yang tergabung dalam instansi pemerintah. Akses terhadap sumberdaya (belum maksimal), hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang masih belum memadai, meskipun pembangunan kualitas SDM dapat dikatakan sudah berjalan.

Kata Kunci: *collaborative governance*; pengembangan; pariwisata, Senggigi.

Collaborative Governance in Tourism Development in the Senggigi Area of West Lombok Regency

Abstract:

This study aims to examine the implementation of Collaborative Governance in the development of tourism in the Senggigi Area of West Lombok Regency. The synergy developed among several stakeholders, including the government, commercial sector, and local community, demonstrates the efficient use of resources in promoting a tourism destination. Making defensible conclusions about the potential of tourist attractions also requires understanding the collaborative efforts made and pinpointing the elements that help or hinder collaboration in the development of the tourism industry. To accurately explain the traits of people, phenomena, and particular group settings, the researcher used a qualitative and descriptive technique. Data were gathered using a variety of techniques, including documentation, interviews, and observation. The study applied the Collaborative Governance theory by DeSève, utilizing its seven indicators as analytical tools. The findings revealed that the overall implementation of Collaborative Governance in tourism development in the Senggigi Area has not yet reached its maximum potential. This is evident in several aspects: a weak network structure characterized by the limited involvement of relevant actors; a lack of commitment to shared goals and a common mission; a weak level of trust, with strong trust only established among collaborating actors within government agencies; moderate access to power, where the Tourism Office demonstrates openness and knowledge about the performance of other collaborating actors; moderate accountability distribution, with each collaborating actor having assigned tasks; suboptimal information sharing, primarily limited to those affiliated with government agencies; and suboptimal access to resources, as evidenced by inadequate infrastructure development, despite progress in developing human resources.

Keywords: Collaborative governance, development, tourism, Senggigi.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

P3B *Humaira, M.Pd
NDN. 0803048601

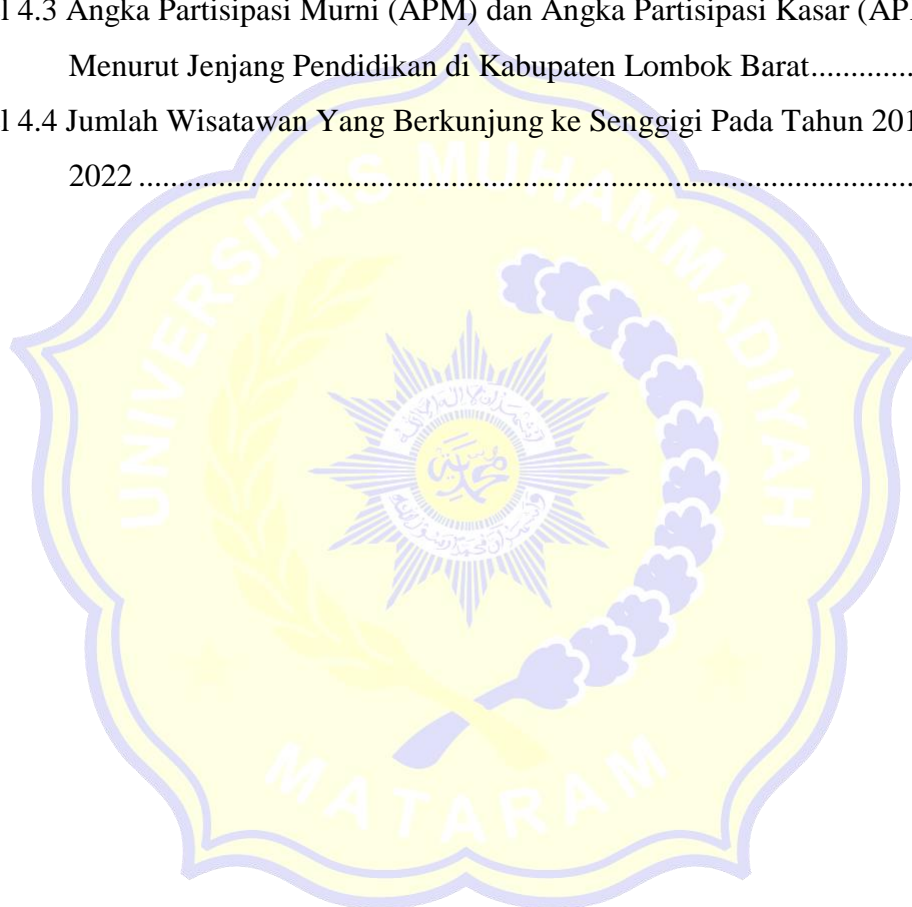
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Penelitian Terdahulu	13
2.2. Kerangka Teori	25
2.2.1 Konsep <i>Colaborative Governance</i>	25
2.2.2 Pengembangan Pariwisata	39
2.3. Kerangka Pemikiran.....	42
2.4. Definisi Konseptual	43
2.5. Definisi Operasional	45
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	47
3.1. Jenis Penelitian.....	47
3.2. Lokasi Penelitian.....	48
3.3. Waktu Penelitian.....	48
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	48

3.5. Teknik Penentuan Narasumber	49
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat	54
4.1.1 Kondisi Geografis.....	54
4.1.2 Keadaan Demografi (Kependudukan)	57
4.1.3 Ketenagakerjaan	58
4.1.4 Pendidikan	59
4.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat	60
4.2.1 Visi dan Misi	61
4.2.2. Tujuan.....	62
4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	63
4.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	63
4.2.3. Struktur Organisasi	64
4.3 Gambaran Umum Pariwisata Kawasan Senggigi	65
4.4 <i>Collaborative Governance</i> dalam Perkembangan Pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat.....	68
4.4.1 Struktur Jaringan	69
4.4.2 Komitmen terhadap Tujuan.....	82
4.4.3 Kepercayaan.....	85
4.4.4 Akses terhadap Kekuasaan.....	89
4.4.5 Pembagian Akuntabilitas	92
4.4.6 Berbagi Informasi.....	98
4.4.7 Akses terhadap Sumberdaya	100
4.5 Faktor Penghambat <i>Collaborative Governance</i>	100
BAB V PENUTUP	109
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu.	21
Tabel 2.2 Definisi Oprasional <i>Collaborative Governance</i>	45
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian	50
Tabel 4.1 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat ...	56
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat	57
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat.....	60
Tabel 4.4 Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke Senggigi Pada Tahun 2016- 2022	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Lombok Barat	55
Gambar 4.3 Kolaborasi Pemerintah dengan Pemerintah	72
Gambar 4.4 Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat	94



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian	120
Lampiran 2. Surat Penerimaan Jurnal Ilmiah.....	121
Lampiran 3. Lembar Kontrol Bibingan Skripsi	122
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	124



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi suatu negara, terutama bagi pemerintahan daerah. Selama beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata telah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan secara global serta memperluas lapangan kerja. Pariwisata adalah sumber daya yang ada di setiap wilayah, termasuk objek wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata buatan, serta berbagai jenis lainnya. Teks tersebut mengungkapkan setiap daerah memiliki potensi wisata yang dapat ditemukan, diolah, dikelola, dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal hiburan dan fasilitas rekreasi. Pemanfaatan pariwisata secara maksimal juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi pengelolaannya di wilayah serta menciptakan peluang kerja (Putri, 2020).

Di Indonesia, perkembangan industri pariwisata, terutama sebelum wabah Covid-19, terus berkembang dengan pesat. Menurut laporan *The Travel & Tourism Competitiveness Report*, peringkat keunggulan pariwisata Indonesia di dunia telah meningkat menjadi peringkat 40 pada tahun 2019 dari peringkat 42 pada tahun 2017. Laporan ini diterbitkan oleh *World Economic Forum* pada tahun 2019. Pada tahun 2015, sektor pariwisata mencatatkan kontribusi sebesar 12,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Selanjutnya, pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 13,6 miliar

dolar AS dan tahun 2017 meningkat menjadi 15 miliar dolar AS. Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 15,81 juta wisatawan dari luar negeri yang mengunjungi Indonesia. Jumlah kunjungan turis asing meningkat sebesar 12,58 persen dibandingkan dengan tahun 2017 (Syahputra & Ma'ruf, 2020).

Tetapi, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan yang sangat tajam dalam jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Selama masa pandemi, semua tempat tujuan wisata yang ada di Indonesia akan dihentikan sementara demi meminimalkan penularan virus Covid-19. Walaupun di era normal baru pertengahan tahun 2020, beberapa lokasi wisata telah dibuka kembali dengan melaksanakan aturan kesehatan yang ketat, tetapi keinginan masyarakat untuk berlibur masih rendah (Ramadani Siagian, 2020). Data yang tercatat oleh lembaga utama statistik (BPS) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 722.158733 orang melakukan perjalanan wisata di Indonesia dari 34 provinsi di seluruh Nusantara. Pada tahun 2020, ketika Covid-19 telah menyebar di Indonesia, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah total wisatawan domestik, dengan angka menurun sekitar 203.569771 orang menjadi hanya 518.588962. Sebagian besar jumlah tahun 2019 berkurang lebih dari separuhnya pada 2020 ketika pandemi terjadi (Suwandiman, 2020).

Seiring dengan penurunan kecepatan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dan keputusan pemerintah untuk mengizinkan beroperasinya kegiatan masyarakat di beberapa daerah, timbul harapan baru mengenai berbagai hasil positif terkait pemulihan sektor pariwisata setelah pandemi.

Dukungan terhadap harapan ini juga didukung oleh langkah-langkah strategis pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata, seperti langkah-langkah untuk melindungi karyawan di industri pariwisata, pengalihan dana ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta bantuan ekonomi kepada pengusaha di sektor ini (Mitra Indonesia, 2020).

Pengembangan dalam bidang pariwisata adalah salah satu sektor yang menjanjikan yang harus didorong, hal ini sesuai dengan pernyataan “Pariwisata merupakan potensi yang berharga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi kesenjangan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, serta membangun keterhubungan yang saling menguntungkan dengan sektor lain termasuk penyedia layanan” (Aeni & Astuti, 2019). Di samping itu, sektor wisata juga diyakini dapat menggerakkan perekonomian kawasan baik dalam skala global maupun regional di mana dapat meningkatkan pendapatan negara, pendapatan daerah maupun penghasilan komunitas setempat (Soebagyo, 2018). Keuntungan dari industri pariwisata menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran yang penting dalam upaya pembangunan suatu negara atau wilayah. Karena alasan ini, perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan komprehensif. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pihak atau pelaku, seperti pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat serta entitas lain yang diharapkan dapat mendukung kelangsungan perkembangan sektor pariwisata.

Suryahudaya (2020) Dijelaskan bahwa suatu strategi (termasuk strategi di sektor pariwisata) dapat sukses apabila dilakukan kerja sama, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, masyarakat, dan kelompok sosial. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga menyatakan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memperkuat pemajuan ekonomi rakyat (Rachmahyanti, n.d.). Konsep kolaborasi ini selanjutnya dikenal dengan istilah *collaborative governance* (Faidati & Muthmainah, 2018). Dalam konteks kerja sama antar sektor, terutama dalam pengembangan pariwisata, adalah sangat relevan karena pariwisata yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya dengan kontribusi dari satu pihak saja, tetapi juga memerlukan kerja sama dari berbagai sektor (Hermansyah, dkk., 2020).

Daerah Lombok di Indonesia terkenal dengan keindahan-keindahannya, mulai dari panorama alam yang menakjubkan hingga budayanya yang kaya. Pada akhir-akhir ini, Lombok menjadi salah satu tempat tujuan wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan dari dalam maupun luar negeri (Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2021).

Dengan bertambahnya jumlah pengunjung, menandakan komitmennya berbagai pihak dalam mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di Lombok. Dapat dilihat kesungguhan ini melalui berbagai penghargaan yang diraih oleh Lombok di bidang pariwisata. Contohnya, pada tahun 2016, Lombok berhasil memenangkan empat kategori dalam kompetisi Wisata Halal Nasional 2016. Salah satunya adalah penghargaan untuk Resort yang

Ramah bagi Wisatawan Muslim Terbaik yang diperoleh oleh Novotel Lombok Resort & Villas yang berada di Lombok Tengah, NTB. Situs web Terbaik untuk Wisatawan Muslim (Wonderful Lombok Sumbawa: www.wonderfulLombokSumbawacom) Lembah Sembalun di Lombok Timur, NTB, merupakan salah satu destinasi bulan madu terbaik yang dapat menarik wisatawan muslim. Terdapat sebuah kuliner khas yang terkenal di daerah NTB, yaitu Ayam Taliwang Moerad (Arifin, 2017).

Pemerintah Provinsi NTB dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor n Pada tanggal 15 Agustus 1989, Tahun 1989 mengesahkan 15 kawasan yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Pulau Lombok memiliki sembilan area, sementara Pulau Sumbawa memiliki enam area. Kawasan Senggigi merupakan salah satu kawasan pariwisata yang memiliki potensi untuk dijadikan destinasi wisata unggulan di Pulau Lombok. Pada tahun 2013, pihak otoritas Provinsi Nusa Tenggara Barat sekali lagi mengumumkan peraturan daerah (Perda) dengan nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah tahun 2013-2028. Di dalam regulasi setempat dinyatakan mengenai keberadaan Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah (KSPW). Kawasan Sarana Pariwisata Desa (KSPD) merupakan wilayah yang dikenal karena potensi pariwisatanya atau memiliki keunggulan dalam pengembangan pariwisata di tingkat nasional yang memberikan dampak penting dalam beberapa aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan budaya, pemanfaatan sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan, serta keamanan dan pertahanan (K a n o m, 2015).

Kebijakan terkait pengaturan pariwisata juga telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat 2011-2031. Dalam bagian ketiga mengenai kawasan budi daya dalam Bab V tentang Rencana Pola Ruang Wilayah, Pasal 26 menegaskan bahwa rencana penggunaan kawasan pariwisata, seperti yang dijabarkan dalam Pasal 19 huruf g, berfokus pada: pertama, kawasan wisata alam (termasuk di antaranya kawasan Pantai Senggigi dan sekitarnya). Kawasan wisata budaya juga merupakan yang kedua dalam hal ini. Pada ketiga, zona pariwisata buatan diusulkan di wilayah kecamatan yang memiliki prospek untuk pertumbuhan. Pengaturan pengelolaan kawasan pariwisata didasarkan pada peraturan perundangan yang telah berlaku (Hariady, 2018).

Berdasarkan undang-undang setempat mengenai penataan tata ruang di Kabupaten Lombok Barat, kawasan Senggigi termasuk dalam daerah yang sedang dikembangkan sebagai wisata alam. Kawasan pariwisata Senggigi bahkan menjadi kontributor terbesar terhadap Lombok Barat memiliki sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2014 mencapai 140 miliar rupiah, dengan 50-60% didapat dari sektor pariwisata, terutama area Senggigi, Narmada, dan Sekotong (bisnis.com, 2014).

Kawasan Senggigi adalah salah satu tempat pariwisata terpopuler di Lombok Barat. Wilayah ini menjadi tujuan favorit dan paling sering dikunjungi oleh para wisatawan. Dengan keberadaan daya tarik alam yang

luar biasa termasuk pantai yang menakjubkan serta keberadaan pasir putih, jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat ini cukup signifikan. Keelokan pantai ini sering kali menjadikannya salah satu pantai tercantik di Lombok (Mahottama Sakti et al., 2015). Untuk mengoptimalkan potensi yang beragam di Kawasan Senggigi dan mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, dibutuhkan sebuah strategi pengembangan yang melibatkan kerjasama semua pihak.

Disisi lain, pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi saat ini dinilai belum berjalan maksimal. Meskipun Senggigi sempat menjadi primadona pariwisata di Lombok, kini Senggigi dianggap tertinggal jauh dari berbagai pariwisata baru yang bermunculan, khususnya pasca pandemi Covid-19 (dispar.lombokbarat.go.id., 2023). Berbagai permasalahan lain yang muncul dalam pengembangan Kawasan Senggigi, juga turut memberikan dampak pada redupnya pariwisata Senggigi dibandingkan dengan pariwisata-pariwisata lain yang ada di pulau Lombok. Permasalahan-permasalahan tersebut terdiri dari: *pertama*, adanya pendapat yang mengatakan bahwa pembangunan di Kawasan Senggigi merupakan pembangunan yang salah urus, ini dilihat dari banyaknya hotel maupun villa yang pembangunannya hanya setengah jadi, disepanjang jalan Kawasan Senggigi banyak ditemukan pembangunan yang mangkrak dan hanya menyisakan puing-puing yang ditumbuhi oleh rerumputan. Tentu saja, ini akan mempengaruhi keindahan pariwisata Kawasan Senggigi (berbaginews.com., 2022).

Kedua, banyaknya sampah yang ada di Kawasan Senggigi. Mengutip dari pendapat Ratna Puspita (dalam news.republika.com., 2022) menyatakan bahwa sampah di Kawasan Senggigi hingga saat ini mencapai 1,4 ton. Kurangnya perhatian pemerintah maupun pelaku usaha dan wisata serta warga terhadap kondisi lingkungan seperti sampah turut menjadi faktor yang menyebabkan kawasan Senggigi menjadi suram.

Ketiga, perubahan fokus dan minat wisatawan atau aktor pariwisata juga berdampak pada situasi di Senggigi. Perkembangan tiga pulau di KLU, saat ini mendorong minat ke daerah Sembalun, dan mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, pelaku industri, bahkan media terhadap Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang akan menyelenggarakan event MotoGP 2021, telah membuat citra dan jumlah kunjungan wisatawan ke Senggigi turun drastis. Saat ini mungkin tidak berlebihan jika banyak orang menyebut Senggigi hanya sebagai jalan menuju tiga Gili (Trawangan-Meno-Air) yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Meskipun belum ada prestasi yang dihasilkan, Senggigi bahkan dianggap telah menjadi representasi keunggulan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta Lombok Tengah.

Pemerintah pada dasarnya telah melakukan beberapa upaya untuk membangun kembali pesona pariwisata di Kawasan Senggigi. Beberapa pengembangan yang dilakukan terdiri dari: (1) Pada tahap awal, akan dilakukan eksplorasi terhadap potensi wisata, kebudayaan, dan kuliner yang ada di setiap dusun di Desa Senggigi. Contohnya, pasar makanan tradisional

dan Taman Trigona Mangsit. (2) Kemudian, rencananya akan dibentuk sebuah rute hiking di area gunung Mangsit yang terletak di sebelah timur Pantai Senggigi. (3) Area berkemah, homestay, dan arena latihan panahan juga akan didirikan di hutan Senggigi. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat telah melakukan kegiatan pelatihan digital marketing untuk para pelaku ekonomi kreatif seni pertunjukan di Desa Batulayar, Lombok Barat pada pertengahan bulan April 2021. Beliau juga menyebutkan mengenai daerah Senggigi. Mendapatkan pembangunan aktif dan dipercepat di Senggigi menjadi tujuan penting untuk mendorong perkembangan destinasi utama Mandalika (cnn.indonesia.com., 2021).

Dipicu oleh isu tersebut, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan industri pariwisata di kawasan Senggigi. Selain itu, riset ini juga akan meneliti elemen-elemen yang mendorong dan menghalangi kolaborasi pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi. Penelitian ini begitu penting mengingat beberapa alasan, yaitu: (1) kolaborasi merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi, sebab pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan melibatkan banyak pihak (seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat). Oleh karenanya, perlu diketahui bagaimana kolaborasi tersebut dibangun dan dijalankan dalam proses pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi, sehingga dapat diketahui kendala serta solusi dalam proses pengembangannya; (2) mengacu pada berbagai permasalahan pengembangan

pariwisata di Kawasan Senggigi, maka kolaborasi menjadi aspek penting yang perlu untuk dikaji, sebab permasalahan tersebut hanya akan dapat di atasi melalui terbangunnya model kolaborasi yang tepat antar berbagai stakeholder. Alasan ini didukung oleh pendapat Sentanu (2020), yang mengungkapkan bahwa dalam mengatasi permasalahan pariwisata diperlukan adanya peran dalam menghadapi tantangan kompleks dalam pengembangan pariwisata, penting untuk memastikan peran optimal dari setiap pemangku kepentingan, serta menerapkan strategi kolaborasi yang strategis dan sinergis melalui partisipasi pihak terkait dapat di atasi hanya dengan satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “*Collaborative Governance* Dalam Perkembangan Pariwisata Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian, bisa dikenali permasalahan yang ada yaitu:

- 1) Bagaimana kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.
- 2) Apa saja elemen-elemen yang menjadi penghalang *collaborative governance* dalam pengelolaan bersama dalam pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah Senggigi, daerah Lombok Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: mengubah masalah yang telah diusulkan.

- 1) Untuk memahami bagaimana komunitas dapat bekerja sama dalam mengembangkan pariwisata di daerah Senggigi Kabupaten Lombok Barat.
- 2) Untuk mencari tahu elemen-elemen yang mendorong dan menghalangi Kerjasama pemerintah dalam pengembangan sektor wisata di area Senggigi di Lombok Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagai peneliti, diharapkan ada keuntungan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini, antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Untuk penelitian ini, diharapkan bahwa hasilnya akan memberikan manfaat yang bermanfaat bagi masyarakat, pengelola Pariwisata Kawasan Senggigi dan terutama bagi pembaca untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman mereka. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan menyelidiki permasalahan yang serupa.

2) Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis untuk lebih mengkonsentrasikan upaya menyelenggarakan Pariwisata Kawasan Senggigi dengan memanfaatkan strategi collaborative governance yang melibatkan tiga pihak, yakni pemerintah, sektor privat, dan masyarakat.

3) Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi intelektual yang berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara luas serta menambahkan sumber bacaan yang berkualitas di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ini dimanfaatkan untuk memberikan dukungan dan referensi kepada penulis saat menjalankan penelitiannya sehingga memperkaya teori-teori yang akan diterapkan dalam mempelajari penelitian yang dilakukan. Selain itu, sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan pemahaman materi studi dan perbincangan penelitian. Sehubungan dengan studi sebelumnya, hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Khairurrasyid dan Awang Darumurti (Rasyid et al., 2022) Mengeksplorasi Penelitian ini berjudul "Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Bahari di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah pada Periode 2020-2021". Hasil riset yang dilakukan menunjukkan peran yang dimainkan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola utama KEK Mandalika, DPMPTSP Kabupaten Lombok Tengah berperan sebagai pengelola pemerintahan daerah, masyarakat sebagai pengusaha atau pedagang, dan pihak perusahaan swasta yaitu PT. Bunga Raya Lestari bekerja sama dengan rekan kerja sebagai penyedia layanan konstruksi. Sementara manajemen dan

pengembangan KEK Mandalika telah melihat peningkatan dalam kolaborasi menggunakan 4 indikator, masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, terutama dalam memperkuat dialog dan komunikasi untuk menghindari miskomunikasi dengan masyarakat setempat dan memperlancar pelaksanaan proyek tersebut.

2. Dipo et al., (2022) melakukan studi yang berjudul "Menerapkan Konsep Kolaborasi Pemerintahan dalam Membangun Kawasan Objek Wisata Goa Putri di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan". Penelitian tersebut mencatat bahwa kerja sama antara berbagai pihak masih memiliki kelemahan dan kekurangan, namun adanya kerja sama yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan pihak swasta selaku pemilik tempat wisata berusaha untuk memberikan informasi mengenai pariwisata, mengembangkan sektor pariwisata, memperbaiki produk wisata, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memajukan daerah. Meskipun belum ada komitmen yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, faktor pendukung seperti kurangnya minat masyarakat sekitar terhadap pengembangan Kawasan Objek Wisata Goa Putri tetap menjadi kendala yang dihadapi.
3. Hermansyah et al., (2020) meneliti tentang "Pemodelan Kerjasama dalam Peningkatan Industri Pariwisata di Kabupaten Sinjai". Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peranan aktor dalam kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai masih didominasi oleh aktor pemerintah, sedangkan peranan aktor masyarakat dan swasta

belum mencapai tingkat optimal. Maka diperlukan sebuah Model Kolaborasi Pengembangan Pariwisata di kabupaten Sinjai yang memiliki tiga aspek penting, yaitu kolaborasi yang dinamis, kebebasan, dan penyebaran informasi mengenai pariwisata. Hal ini akan memungkinkan terjalinnya kerjasama antar sektor dalam menciptakan disteminasi pariwisata serta meningkatkan infrastruktur pariwisata.

4. Kedasi Silayar, Ika Sartika, dan Deti Mulyati (2021) melakukan riset dengan nama "Manajemen Pemerintahan Bersama dalam Upaya Peningkatan Potensi Pariwisata di Daerah Kepulauan Sula " Penelitian menghasilkan temuan bahwa ideologi governansi kolaboratif yang ditawarkan terdiri dari delapan aspek, yakni: (1) *network structure*: Tidak ada hierarki dalam struktur jaringan, namun lebih condong menyebarkan kekuasaan secara merata dan tidak dominan (2) *Commitment to a common purpose*: Minat pemerintah terhadap pengembangan sektor pariwisata belum mencukupi dalam implementasinya, pembinaan, pengembangan, dan kurangnya kolaborasi yang intensif (3) *trust among the participants*: dengan keberadaan keyakinan terhadap informasi yang disampaikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam perkembangan sektor pariwisata dan menjalin hubungan profesional (4) *Governance*: belum ada kejelasan mengenai siapa yang bukan pemangku kepentingan karena belum terdapat kesepakatan atau peraturan tertulis yang mengatur secara khusus kerjasama untuk membentuk keanggotaan (5) *Access to*

authority: Semua pihak yang terlibat telah sadar akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, namun dalam berkomunikasi antara pihak-pihak tersebut masih terkendala karena beberapa tempat wisata mengalami perbaikan pada jaringan internetnya (6)

Distributive accountability/responsibility: Dalam mengembangkan sektor pariwisata, setiap pemangku kepentingan melakukan laporan pertanggungjawaban secara beragam (7) *Information sharing*: Untuk kemajuan pariwisata yang lebih baik, diperlukan peningkatan dalam penyampaian informasi yang dibagikan (8) *Access to resources*:

Tersedia sedikit dukungan dari pemerintah, terutama untuk sumber daya manusia dan teknis dalam bidang infrastruktur pariwisata. Dinas pariwisata masih kekurangan tenaga teknis dan ahli yang bisa membantu dalam pengembangan dan perbaikan.

5. Putu Nomy Yasintha (2020) melakukan riset dengan judul "Gubernur Bersama dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Gianyar". Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dalam menggunakan metode kualitatif dengan memilih informan secara sengaja dan secara perlahan. Temuan dari penelitian ini ialah bahwa pengelolaan Kebun Raya Tematik Gianyar saat ini hanya menggantungkan diri pada pemerintah semata, partisipasi dari sektor swasta masih sangat rendah. Terlebih lagi, belum ada ketentuan yang tegas. Dalam hal ini, desa adat masih belum memberikan peran yang jelas kepada penduduk dalam mengelola Taman Botani Tematik Gianyar.

6. Cintantya Adhita Dara Kirana, Rike Anggun Artisa (2020) menjalankan sebuah penelitian yang berjudul "Pengembangan Pariwisata Pedesaan dengan Menggunakan Kolaborasi Governance di Kota Batu". Dilaporkan oleh penelitian bahwa pemerintah Kota Batu menggunakan Pendekatan Kerjasama Pemerintahan dalam mengembangkan desa pariwisata. Dapat dilihat dengan adanya keteraturan kerjasama dan komunikasi yang terjalin oleh pemerintah daerah Kota Batu dengan berbagai instansi seperti perusahaan swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan industri media. Setiap anggota tim memiliki kontribusi yang sesuai dengan peran individunya.
7. Alamsyah, dkk. (2019) Anggito melakukan riset dengan judul "*Collaborative Governance* dalam Mempromosikan Pariwisata Pendidikan di Kamiri, Masamba, Luwu Utara". Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Kolaboratif melibatkan serangkaian langkah, yakni: (1) *face to face* Dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan pengelola terlibat dalam diskusi dan berbagai pertemuan seperti forum musyawarah (2) *Trust building* untuk membangun kepercayaan, pihak pengelola dapat menggunakan metode pelatihan untuk mengembangkan potensi SDM serta menyediakan fasilitas tempat sampah di area wisata (3) *Commitment to process* dalam mengembangkan pariwisata edukasi, ada keterlibatan baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama berkolaborasi (4) *share Understanding*

Untuk memperkirakan sejauh mana kolaborasi yang terjadi dalam perkembangan wisata pendidikan, terdapat platform bagi pengelola, dilakukan pemantauan atau monitoring wisata yang membantu dalam mempertahankan keamanan wisata edukatif, dan juga dilakukan promosi untuk atraksi wisata.

8. Nadia F Tongkotow, Welly Waworundeng, Alfon Kimbal (2021) melakukan penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* di Kecamatan Ratatotok, terdapat tempat wisata Pantai Lakban yang dikelola dengan baik”. Penelitian mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengembangkan pantai Lakban memiliki rendahnya tingkat partisipasi dan perhatian terhadap komunitas di desa Ratatotok Timur. Faktanya, keputusan mengenai pengembangan pariwisata di Pantai Lakban secara eksperimental diambil oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara tanpa mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa Ratatotok Timur. Akibatnya, keinginan-keinginan dari masyarakat yang terkait dengan perkembangan sektor pariwisata di Pantai Lakban tidak dapat dipenuhi dengan memadai. Masyarakat diminta untuk ikut serta dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan, meskipun hasil tersebut tidak memberikan dampak yang sangat penting untuk kemakmuran penduduk desa Ratatotok Timur. Akhirnya, Desa Ratatotok Timur belum memperoleh manfaat yang optimal dari Pantai Lakban dalam meningkatkan kemakmuran dan kualitas kehidupan para penduduknya.

9. Aninda Diah Maharani Utami, Dyah Hariani, Susi Sulandari (2021) melakukan kajian dengan nama "Kolaborasi Pemerintahan dalam Peningkatan Desa Wisata Kemetul, Daerah Susukan, Wilayah Semarang". Dari penelitian didapatkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti yang terungkap dalam analisis model kolaborasi Ansell dan Gash, seperti peraturan yang kurang jelas, pemahaman yang berbeda mengenai tujuan yang sama, dan kurangnya keterlibatan dan dedikasi. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan, di antaranya adalah keyakinan yang kuat, adanya regulasi yang ada, pembagian tanggung jawab, memperuntukkan data dan ketersediaan aset. Tetapi, masih ada beberapa indikator yang belum tercapai, seperti struktur organisasi, dedikasi, dan ketegasan dalam pengelolaan.
10. Kurnia Alvin Syahputra dan Muhammad Farid Ma'ruf (2020) Meneliti dengan topik "Kerja Sama antara Pemerintah dalam Mengelola Pariwisata di Pantai (Penelitian di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perusahaan Negara Perhutani Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar)". Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kolaborasi dalam asesmen menghadapi masalah overlapping antara para pemangku kepentingan yang menghambat proses pengelolaan. Program ini diinisiasi oleh pihak pemerintah daerah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sebuah acara digelar dengan tujuan mencapai kesepahaman

kolektif, hak dan kewajiban, serta peran stakeholder dalam pembangunan kerjasama. Ada pergeseran lokasi yang terjadi pada tujuan wisata yang mencakup fasilitas dan layanan usaha. kompetensi sumber daya manusia, dan pemangku kepentingan yang memahami tanggung jawab dan tugas mereka.



Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Governance</i> ini bertujuan untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan berdaya saing dalam industri wisata bahari. Selama periode 2020-2021,	Dengan mengangkat tema penelitian yang serupa, yakni kolaborasi pemerintah yang terpusat dalam memajukan sektor pariwisata.	Penelitian sebelumnya lebih mengutamakan penelitian mengenai kolaborasi pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kolaborasi pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi.
2.	Pendekatan kerjasama dalam pemerintahan dalam pengembangan daerah tujuan wisata Goa Putri di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, merdeka	Memiliki fokus yang serupa, yaitu kerja sama dalam pengembangan pariwisata,	Fokus utama penelitian adalah pada pengkajian kolaborasi pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Objek Wisata Goa Putri. Namun, penelitian saat ini lebih difokuskan pada kolaborasi pemerintah dalam perkembangan pariwisata di Kawasan Senggigi.
3.	Model Kolaborasi dalam Pengembangan Parawisata Di Kabupaten Sinjai	Dengan fokus pada penerapan konsep governansi kolaboratif dalam upaya pengembangan sektor pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sebelumnya lebih berkonsentrasi pada bentuk kerjasama dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Di Daerah Sinjai, sementara penelitian terbaru ini lebih memfokuskan pada pengkajian kepemimpinan kolaboratif dalam perkembangan pariwisata di Wilayah Senggigi. - Penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada analisis model kolaborasi, sedangkan dalam penelitian ini juga menitikberatkan pada faktor penyebab dan hambatan kolaborasi pemerintah.

4.	Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula	Memiliki fokus penelitian yang serupa, yakni governansi kolaboratif dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sebelumnya lebih memusatkan perhatian pada pengaturan tata kelola kerjasama pemerintahan dalam Pengembangan Parawisata di Kabupaten Kepulauan Sula, namun penelitian ini lebih fokus mengamati tata kelola kerjasama dalam perkembangan pariwisata di Kawasan Senggigi. - Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengelolaan pemerintahan yang berkolaborasi, sementara dalam penelitian ini juga menitikberatkan pada faktor pendorong dan penghambat dalam kolaborasi pemerintahan.
5.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar	Mempunyai fokus penelitian yang serupa, yakni kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada manajemen bersama pemerintahan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Gianyar, sedangkan penelitian ini fokus pada penyelidikan tata kelola kolaboratif dalam kemajuan pariwisata di Kawasan Senggigi. - Penelitian sebelumnya hanya memusatkan perhatian pada pengelolaan pemerintahan yang kolaboratif, sedangkan penelitian ini juga menekankan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kolaborasi dalam pemerintahan.

6.	Pengembangan Desa Wisata Berbasis <i>Collaborative Governance</i> di Kota Batu	Dengan topik penelitian yang serupa, yakni kolaborasi pemerintahan dalam pengembangan sektor pariwisata .	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sebelumnya, penelitian lebih berorientasi pada upaya meningkatkan desa pariwisata melalui pendekatan kolaboratif pemerintahan di Kota Batu. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi tentang kolaborasi pemerintahan dalam kemajuan pariwisata di Kawasan Senggigi. - Penelitian sebelumnya, penelitian hanya menitikberatkan pada pendekatan collaborative governance yang diterapkan. Namun, dalam penelitian ini, juga diperhatikan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kolaborasi antara pemerintah.
7.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara	Dengan memiliki fokus penelitian yang serupa, yaitu kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata, .	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pengelolaan bersama dalam pengembangan pariwisata edukatif, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada eksplorasi pengelolaan bersama dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi. - Penelitian sebelumnya memanfaatkan variabel kerjasama dari Ansell dan Gash, sedangkan dalam penelitian ini digunakan variabel analisis dari DeSave yang diubah.

8.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok	Sama-sama membahas tentang <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan pariwisata, tema penelitian yang diangkat dalam keduanya serupa.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sebelumnya mengutamakan <i>collaborative governance</i> dalam manajemen pariwisata Pantai Lakban, sementara penelitian terkini lebih berkonsentrasi pada <i>collaborative governance</i> dalam pertumbuhan pariwisata di Kawasan Senggigi. - Penelitian sebelumnya memanfaatkan faktor kolaborasi dari Ansell dan Gash, sementara kajian ini memanfaatkan faktor analisis dari DeSave.
9.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang	Bertujuan dalam pengembangan pariwisata, kedua tema penelitian ini adalah tentang kolaborasi dalam tata kelola bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sebelumnya lebih mengkhususkan pada governansi kolaboratif dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul, sementara penelitian ini mengutamakan eksplorasi governansi kolaboratif dalam pertumbuhan pariwisata di Kawasan Senggigi. - Studi sebelumnya menggunakan variabel proses kerjasama yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, sementara penelitian ini menggunakan variabel analisis yang dikembangkan oleh DeSave.
10.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi pada Dinas Pariwisata	Dengan memiliki fokus penelitian yang serupa, yaitu kolaborasi dalam pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Blitar, sedangkan

	Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blita, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar	pariwisata.	<p>penelitian ini lebih berfokus pada penelitian tata kelola kolaboratif dalam pertumbuhan pariwisata di Kawasan Senggigi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian sebelumnya memanfaatkan faktor kerja sama dari More dan Stephens, sementara penelitian baru ini menggunakan faktor pemeriksaan dari DeSave. -
--	---	-------------	--

Sumber: Olah data Sekunder

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Konsep *Collaborative Governance*

2.2.1.1. Definisi *Governance*

Belakangan ini istilah tata kelola tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Ide yang mulai berkembang pada dekade awal 90-an ini dicirikan oleh sudut pandang yang inovatif terhadap peran pemerintah dalam tata kelola pemerintahan. *Governance* merujuk pada interaksi antara pemerintah/negara dengan rakyatnya sehingga memungkinkan berbagai keputusan dan regulasi serta inisiatif dapat dibentuk, dilaksanakan, dan dinilai.

Menurut Davis dan Keating (dalam Sudarmo, 2011) *Governance* merupakan proses di mana entitas, baik negara maupun non-negara, berkolaborasi dalam mengatur dan mengendalikan pemerintahan suatu negara. Dia etika yang tidak terlalu berbeda menurut Kaufman, Kraay, dan Mastruzzi (dalam Syafri, 2012) *governance* Keterlibatan diartikan sebagai

keterkaitan antara pemerintah dan rakyat yang mempermudah terbentuknya, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program publik. Secara umum, hal ini merujuk pada peraturan, lembaga, dan hubungan yang mempengaruhi cara suatu negara atau organisasi beroperasi.

Definisi-definisi ini mengacu pada suatu proses keterlibatan dan relasi saling berpengaruh yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah publik. Artinya dalam konteks ini menuntut kehadiran partisipasi dari pihak eksternal tidak hanya pemerintah semata dalam pembentukan sebuah kebijakan. (Widayat, dkk., 2022).

Sama dengan yang dinyatakan oleh Colebatch (dalam Sudarmo, 2011), hal ini mengindikasikan bahwa individu atau kelompok yang dianggap sebagai pemangku kepentingan di luar pemerintah dan memiliki hak untuk terlibat seharusnya dilibatkan dalam menentukan apa yang harus dilakukan dan mungkin melaksanakannya. Dalam situasi ini, kerjasama dari para pihak di luar pemerintahan yang terlibat sangat diperlukan dalam menciptakan sebuah kebijakan/program.

Lebih jelas, menurut (Dwiyanto, 2013), *governance* pada kenyataannya, kekuasaan tidak lagi hanya ada di tangan pemerintah atau terbatas pada mereka semata. Namun, praktik pengaturan pemerintahan lebih fokus pada kolaborasi pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh berbagai entitas, seperti organisasi non-pemerintah, badan usaha pribadi, dan individu warga negara.

Stoker (dalam Sudarmo, 2011) menjelaskan ide governance dalam lima pernyataan. Governance menggambarkan sekumpulan lembaga dan individu yang berasal dari dalam dan di luar pemerintahan. Selanjutnya, tata kelola mengenali ketidakjelasan batas-batas dan kewajiban dalam menangani masalah-masalah ekonomi dan sosial. Ketiga, tata kelola mengenali ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam tindakan bersama. Di sisi lain, tata kelola melibatkan berbagai pihak yang memiliki otonomi dalam mengatur diri serta menjaga keseimbangan di antara mereka. Selanjutnya, pengelolaan yang baik mengakui kemampuan dalam mencapai hasil tanpa menggantungkan diri pada kekuasaan pemerintah untuk memerintah atau menggunakan kekuasaannya. Pemerintah dianggap memiliki kemampuan dalam menggunakan metode dan teknologi terkini untuk mengendalikan atau membangun. Ini berarti model pengelolaan mulai memperhatikan partisipasi aktif pihak lain yang memberikan arahan atau mengatur, pembatasan dan ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Dengan konsep ini, tata kelola dapat diartikan sebagai strategi yang digunakan oleh pemerintah suatu negara dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai sasaran negara dengan melibatkan entitas di luar pemerintahan atau negara.

2.2.1.2. Definisi *Collaborative Governance*

Berkompleksitasnya tantangan dalam menjalankan pemerintahan mendorong pimpinan negara untuk merancang berbagai kebijakan yang

kadang-kadang sulit dihadapi oleh pemerintah dan pihak eksekutif. Sebagai akibatnya, terjadi konsep inovatif dalam proses pengambilan keputusan dalam hal pemerintahan yang dikenal sebagai kolaborasi pemerintahan. Pada umumnya, kerjasama dipandang sebagai tanggapan organisasi terhadap perubahan atau pergeseran dalam lingkungan kebijakan (Sudarmo, 2011). Kerjasama dalam situasi ini dapat dianggap sebagai cara memberikan tanggapan terhadap perubahan atau pergeseran, sehingga pemerintah dapat tetap beroperasi dan berhasil dalam pengelolaan publik yang rumit dengan melibatkan institusi-institusi non-pemerintah yang berhubungan dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, semua pihak yang terlibat atau perlu terlibat dalam kerjasama, serta jenis dan langkah-langkah kerjasama mungkin beragam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, serta antara satu isu dengan isu lainnya.

Sementara itu, menurut Thomson, et al (2007) Kolaborasi adalah upaya dimana individu yang memiliki otonomi atau semi otonomi berinteraksi melalui mekanisme formal maupun informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan dan metode pengambilan keputusan terkait isu-isu yang mereka hadapi. Proses ini melibatkan adanya norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan. Kolaborasi menurut Aini dan Zitri (2022) adalah sebuah interaksi atau kompromi antar beberapa elemen, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaatnya. Nilai yang menjadi landasan utama

adanya kolaborasi yaitu tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Setelah itu, lebih jauh. Menurut Ansell dan Gash (2009) sebagaimana disebutkan dalam Sudarmo (2011), kerjasama dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu sebagai proses dan norma yang berlaku. Kolaborasi dalam pengertiannya sebagai sebuah proses adalah rangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk mengatur atau mengelola secara institusional. Dalam arti ini, sebagian lembaga, entah itu lembaga pemerintah ataupun non pemerintah juga turut terlibat sesuai dengan sejauh mana kepentingan dan tujuannya. Pada pengertian normatif, ini mencerminkan idealisme atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam menjalin interaksi dengan partner atau mitra.

Berawal dari gagasan tersebut, kolaborasi mengimplikasikan partisipasi berbagai pihak dalam mengorganisir atau mengurus suatu isu yang bersifat umum. Kolaborasi berlangsung di dalam situasi pengelolaan publik ketika berbagai pihak yang terlibat bekerja bersama pemerintah untuk menghasilkan kebijakan inovatif atau menyelesaikan permasalahan masyarakat (Purdy, 2012). Dalam konsepnya, kerjasama sering kali dianggap sebagai bentuk ikatan antara beberapa lembaga yang teridentifikasi memiliki objektif yang serupa dan bergandengan tangan untuk meraih target tersebut (Huxham et al., 2006). Ini dikarenakan kerjasama dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk memahami

perbedaan yang ada di antara mereka dan mencapai tujuan bersama melalui penggabungan sumber daya manusia dan materi yang dimiliki oleh mereka (Lasker et al., 2001).

Kerjasama melibatkan pembentukan kerangka kerja yang memungkinkan para anggota untuk mengambil keputusan tentang cara mengatasi masalah tindakan bersama yang dihadapi, dengan mengembangkan serangkaian aturan kerja mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan, tindakan apa yang diizinkan atau dilarang, informasi apa yang harus disampaikan, serta bagaimana alokasi biaya dan manfaatnya (Thomson, et al, 2007).

Dengan memahami hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa collaborative governance berfokus pada kebijakan dan permasalahan masyarakat. Kerja sama pemerintah muncul sebagai hasil dari upaya kepragmatisan dalam menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya tidak berhasil diatasi melalui penerapan konsep-konsep tradisional yang sebelumnya efektif dalam menghadapi masalah (Ansell & Gash, 2007). Institusi pemerintah memang fokus pada pembuatan kebijakan dengan tujuan dan proses kerjasama untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak terkait. Kerjasama pemerintahan bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Zitri, dkk., 2020).

Kaitannya dengan permasalahan pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi, yang meliputi masalah lingkungan maupun banyaknya

bangunan yang hanya meninggalkan bangkai beton, baik berupa bangunan hotel yang tidak tuntas bangun, hotel atau ruko yang tutup serta rimbunan semak belukar yang semakin mengikis keindahan Senggigi. Maka, *collaborative governance* menjadi harus hadir sebagai upaya untuk mengatasi berbagai polemik pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi. *Collaborative governance* menjadi aspek penting dalam pengembangan Kawasan Senggigi, mengikat kolaborasi ini tidak hanya membutuhkan satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Collaborative governance bisa dipahami sebagai istilah pengawasan yang mencakup berbagai penulisan tentang jaringan, kemitraan, dan keterlibatan pemerintah pihak ketiga, dan juga penulisan yang sama beragamnya tentang pemerintahan demokratis, partisipasi publik dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pencapaian kesepakatan, dan seterusnya (Morse & Stephens, 2018). Itulah sebabnya, kolaborasi pemerintahan tidak hanya diciptakan untuk memenuhi konsep yang kurang jelas tentang pengambilan keputusan yang lebih melibatkan semua pihak, tetapi juga mengikutsertakan "metode pengetahuan" dalam langkah penuntasan permasalahan yang berkelanjutan (Doberstein, 2015).

Dengan mengacu pada beberapa penjelasan tentang kolaborasi pemerintahan, dapat dinyatakan bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan tindakan atau respons dari pemerintah dalam mengatasi isu-isu publik, mengelola tindakan pemerintahan, dan melaksanakan program-

program pemerintah lainnya dengan bekerja sama atau bermitra dengan masyarakat dan instansi swasta lainnya. Hal ini dilakukan karena program/kegiatan dan masalah yang dihadapi cukup rumit. Setelah itu, kerjasama di sini dijelaskan sebagai usaha-usaha bentuk organisasi pemerintahan dapat melibatkan kerjasama antara pemerintah dan entitas non-pemerintah, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, yang memiliki keterkaitan dalam menghadapi suatu permasalahan serupa.

2.2.1.3. Ukuran Keberhasilan *Collabortive Governance*

Austin, et al (dalam Murphy et al., 2014) Terdapat empat aspek kunci dalam memastikan kerjasama antar sektor berjalan sukses, termasuk: a) membangun serta memperluas jalinan hubungan; b) mencapai kesepakatan di antara tujuan, strategi, dan / atau prinsip dasar organisasi; c) mengelola interaksi dengan rekan kerja; dan d) menciptakan nilai positif bagi rekan mitra dan masyarakat. Salah satu dari beberapa dimensi yang ada, dimensi konstruksi dan pengembangan hubungan serta dimensi manajemen antarmuka mitra kolaborasi adalah dimensi yang memiliki cakupan yang luas. Menentukan keberhasilan kolaborasi menjadi tantangan karena sulit untuk mengukurnya secara pasti.

Sementara itu, Ansell & Gash (2007) Dalam collaborative governance, terdapat beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah adanya kebutuhan akan pemimpin yang memiliki keterampilan tertentu. Kemampuan untuk memfasilitasi pertemuan, mengusulkan dan mengawasi diskusi, serta mengorganisasikan ide-ide

menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, para pemimpin juga harus mampu menengahi dan mengatasi konflik, menciptakan suasana yang netral, serta memastikan partisipan tetap terinformasi dan terlibat dalam proses. Mereka juga harus menjaga agar diskusi tetap relevan dan mendorong tercapainya solusi yang bersifat kolektif untuk memecahkan masalah. Maksudnya adalah bahwa kerjasama yang efektif dapat terlihat dari kemampuan pemimpin dalam mewujudkan berbagai komponen tersebut (Widayat dan Kusuma, 2018).

Tidak sejalan dengan pendapat sebelumnya, DeSeve (2009) mengatakan upaya mengevaluasi kesuksesan sebuah jaringan atau kerjasama dengan Elemen-elemen tersebut menjadi parameter kunci dalam menilai keberhasilan kolaborasi. tata kelola, termasuk:

1. *Networked structure* (jenis struktur jaringan)

Jaringan yang terstruktur hierarkis akan berjalan kurang efisien, dan struktur jaringan harus memiliki organisasi dengan tingkat keterhubungan sebesar-besarnya, sehingga tidak ada elemen kepemilikan atau dominasi kekuasaan dalam kerja sama tersebut (Dewi, 2012). Jaringan terdiri dari beberapa entitas seperti perusahaan, komunitas, dan kelompok yang sebagian besar beroperasi secara independen, tersebar di berbagai daerah geografis, dan memiliki perbedaan dalam lingkungan kerja mereka (budaya, modal sosial, dan tujuan). Mereka bekerja bersama dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Maka, kolaborasi sangat penting karena mengatasi isu-isu masyarakat

tidak lagi bisa diselesaikan melalui keputusan tunggal, melainkan melalui keputusan bersama.

2. *Commitmen to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan)

Terkait dengan alasan mengapa sebuah jaringan atau network penting, hal ini berkaitan dengan perhatian dan dedikasi untuk mencapai hasil yang menguntungkan (DeSeve, 2009). Agar kolaborasi dapat berjalan dengan sukses, diperlukan keseriusan dari setiap individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Semua pihak yang terlibat juga didorong oleh pemahaman untuk mencapai target secara bersama-sama. Dengan keberadaan persyaratan ini, secara otomatis akan meningkatkan tingkat kinerja dan efektivitas dalam melakukan kolaborasi menjadi lebih baik, karena aktivitas kolaborasi ini mengharuskan para pihak yang terlibat (stakeholders) untuk memiliki pengetahuan yang mendasar tentang organisasi, yaitu niat dan kesetiaan.

3. *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan)

Keyakinan merupakan fondasi dalam hampir semua pergaulan dalam komunitas. Berdasarkan pada ikatan profesional atau personal; keyakinan bahwa semua anggota memiliki kepercayaan terhadap pengetahuan atau usaha dari pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Ansell & Gash (dalam Piatak et al., 2017) Mendapati bahwa durasi, keyakinan, dan saling bergantung

diperlukan agar kepemimpinan bersama bisa sukses (Huxham et al., 2006) Menjelaskan bahwa keyakinan dan penghargaan adalah elemen krusial apabila ingin mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam kolaborasi. Kepercayaan merupakan 'ikatan' yang tidak resmi yang mengatur kerja sama dalam suatu sistematis organisasi. Manajer dapat berupaya untuk menciptakan atmosfer yang penuh kepercayaan (Piatak et al., 2017).

4. *Governance*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tatakelola merupakan suatu proses keterkaitan dan kelayakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan rakyatnya dalam merumuskan suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah umum. Menurut Fukuyama (2003) Kualitas pengelolaan pemerintahan memiliki perbedaan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pengelolaan pemerintahan itu sendiri. Maknanya, governansi melibatkan kinerja lembaga dalam menjalankan keinginan pihak terlibat, dan bukan mengenai sasaran pihak terkait.

5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan)

Adanya keberadaan standar-standar (dimensi-dimensi) aturan prosedur yang terdefinisi dengan jelas yang diterima secara umum. Untuk sebagian besar jaringan, mereka perlu memberikan wewenang kepada salah satu anggota jaringan untuk menerapkan keputusan atau melaksanakan tugas. Adanya kesempatan untuk memperoleh kekuasaan

ini akan berdampak pada proses kerjasama yang dibangun di antara para pemangku kepentingan.

6. *Distributive accountability/responsibility* (pembagian akuntabilitas / tanggung jawab)

Dasar administratif akuntabilitas jaringan pemerintahan berpusat pada langkah-langkah, tata cara, dan kebiasaan yang digunakan dalam melaksanakan administrasi dan pengaturan jaringan peraturan pemerintah yang telah diatur secara resmi. Akuntabilitas profesional dicirikan dengan pendelegasian pengawasan terhadap kegiatan organisasi kepada para karyawan yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu untuk menyelesaikan tugasnya. Pengakuan kesempurnaan pekerjaan juga dapat dijaga dengan mematuhi tindakan, tata aturan, atau etika profesi atau industri (Mills & Koliba, 2015).

7. *Information sharing* (berbagi informasi)

Turrini, et al (dalam Doberstein, 2016) Mengenali dua jenis faktor yang dapat mempengaruhi mentata kelola kolaboratif, yaitu cara mengatur (misalnya platform berbagi data dan proses pengambilan keputusan) dan kemampuan serta preferensi masing-masing individu yang mengelolanya atau memimpin kerja sama. Sementara itu Friend & Hickling (dalam Doberstein, 2016) Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keahlian dalam apa yang mereka sebut sebagai 'pemrosesan manajerial' sangat krusial dalam mencapai kesuksesan bisnis.

8. *Access to resources* (akses terhadap sumberdaya)

Ketersediaan akses merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan jaringan. Sumberdaya tersebut meliputi sumber keuangan, teknis, tenaga kerja, dan sumberdaya lain yang diperlukan. Jann dan Wegrich (2007) menjelaskan bahwa pemerintah perlu memenuhi beberapa faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk pengalokasian sumber daya seperti anggaran, personel, dan struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.2.1.4. Hambatan dalam *Collaborative Governance*

Banyak elemen dapat menghambat atau menyebabkan kegagalan praktek kolaboratif yang telah didirikan dan berjalan. Newman et al., (2004) melalui penelitiannya, ia menemukan bahwa keikutsertaan merupakan satu faktor yang bisa menyebabkan kegagalan kolaborasi pemerintahan. Ditemukan bahwa keikutsertaan merupakan elemen yang signifikan dalam pengelolaan kolaboratif, meskipun bisa menjadi faktor penghambat, tetapi juga dapat menjadi kendala dalam pengelolaan kolaboratif tersebut jika tiap pemangku kepentingan tidak berpartisipasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Kanada (dalam Sudarmo 2011), terdapat beberapa elemen yang dapat menghambat pelaksanaan kerjasama (dan juga partisipasi), termasuk faktor kebudayaan, faktor lembaga, dan faktor politik. Sementara itu, Sudarmo (2011) juga mencatat beberapa faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan kolaborasi

dalam tata kelola. Berbagai faktor, seperti faktor sosial struktural, faktor budaya dan faktor kepentingan pemerintah, dapat menyebabkan kegagalan kolaborasi, termasuk keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Pertama, yang dapat menyebabkan kegagalan kolaborasi adalah struktur sosial. Hal ini terkait dengan kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi, terutama dari pihak pemerintah, untuk menerapkan hierarki dalam mengatur pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam institusi masih terlalu kaku dalam menerapkan struktur hierarkis, transparansi dan orientasi kebijakan institusi ini juga terkesan memiliki struktur hierarkis, yang tidak sesuai dengan kerjasama yang memerlukan kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah dan non-pemerintah. Selanjutnya, terkait faktor budaya, dapat disimpulkan bahwa kerjasama dapat menghadapi kesulitan karena adanya kebiasaan budaya yang cenderung mengutamakan produsen dan enggan mengambil risiko serta inovasi. Agar tercipta kerja sama yang efektif, para pelayan publik harus memiliki keterampilan dan kemauan untuk terlibat dalam kemitraan secara praktis, dengan fokus pada pencapaian tujuan. Dalam hal lain, bergantung pada prosedur dan tidak berani mengambil risiko adalah salah satu hal yang menghalangi tercapainya efektivitas kolaborasi (Pemerintah Kanada 2008; Sudarmo, 2011). *Ketiga*, kepentingan yang terdapat di antara setiap pemangku kepentingan. Kegagalan kolaborasi dapat terjadi

akibat kurangnya kreativitas dari para pemimpin dalam mencapai tujuan politik yang rumit dan bertentangan. Penting untuk dicatat bahwa kolaborasi dapat kerja sama kelompok dapat terhambat jika pemimpin-pemimpinnya kurang kreatif dalam mencapai tujuan politik yang kompleks dan berpotensi memicu konflik di antara mereka (Sudarmo, 2011).

2.2.2. Pengembangan Pariwisata

2.2.2.1. Definisi Pengembangan Pariwisata

Proses pengembangan melibatkan upaya, metode, upaya untuk meningkatkan, kemajuan, kesempurnaan, dan kebermanfaatan suatu hal (Alwi Hasan dkk, 2005). Pengembangan adalah sebuah upaya meningkatkan suatu hal yang dianggap penting dengan mengubah atau memperbarui yang sudah ada sehingga menjadi lebih menarik dan berkembang.

Peningkatan sektor pariwisata adalah upaya untuk mengembangkan atau menambahkan sarana dan pelayanan yang diperlukan oleh pengunjung agar merasa nyaman selama berlibur di destinasi wisata. Definisi pariwisata didasarkan pada kata-kata dalam Bahasa Sansekerta yang terdiri dari pari dan wisata. Pari berarti berlangsung berulang-ulang atau dilakukan berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau kegiatan bepergian. Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berulang kali (Widayat, dkk., 2021).

Wisata mencakup elemen-elemen seperti aktivitas bepergian, dilakukan secara suka rela, bersifat temporary, perjalanan tersebut secara

total atau sebagian dilakukan dengan tujuan menikmati objek dan daya tarik pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan positif bagi para pengunjung maupun keuntungan bagi masyarakat setempat. Manfaat akan tercipta bagi wisatawan dan penduduk lokal dengan adanya peningkatan pariwisata di suatu wilayah. Untuk penduduk lokal, keuntungannya dalam bidang ekonomi, perhubungan sosial, dan warisan budaya (Zitri, 2022). Namun, apabila peningkatan itu tidak diantisipasi dan diatur dengan cermat, dapat pula menimbulkan banyak masalah yang membahayakan para pengunjung maupun masyarakat setempat. Dengan demikian, untuk memastikan agar sektor pariwisata dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan serta memberikan keuntungan bagi pengunjung dan populasi setempat, diperlukan penelitian yang detail terhadap semua aset dan potensi pendukungnya (Aji, Widayat, dan Jaelani, 2022).

2.2.2.2. Strategi Pengembangan Pariwisata

Perumusan strategi melibatkan penyusunan rencana jangka panjang untuk mengelola peluang dan tantangan yang ada dalam lingkungan, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Melakukan perancangan strategi mencakup menetapkan visi organisasi, menetapkan sasaran, mengembangkan strategi, dan menetapkan panduan kebijakan.

Untuk meningkatkan industri pariwisata, strategi pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk dan layanan yang unggul, seimbang,

dan secara bertahap. Dalam upaya untuk mengembangkan pariwisata, terdapat beberapa langkah kunci yang harus diambil (Suwanto, 1997):

- a. Memperbarui dan memperkuat reputasi sektor pariwisata, Meningkatkan kualitas tenaga kerja, Memperbaiki pengelolaan, Menggunakan produk yang ada, Meningkatkan pangsa pasar pariwisata yang telah ada.
- b. Perhatian utama akan difokuskan pada konsolidasi, terutama dalam memperkuat strategi pariwisata Indonesia, mengkonsolidasikan kemampuan manajemen, mengembangkan dan memvariasikan produk, serta meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja.
- c. Perhatian utamanya adalah pada pertumbuhan dan penyebaran dalam upaya meningkatkan keterampilan manajemen, perkembangan dan penyebaran produk dan layanan.

2.2.2.3. Kebijakan Pengembangan Pariwisata

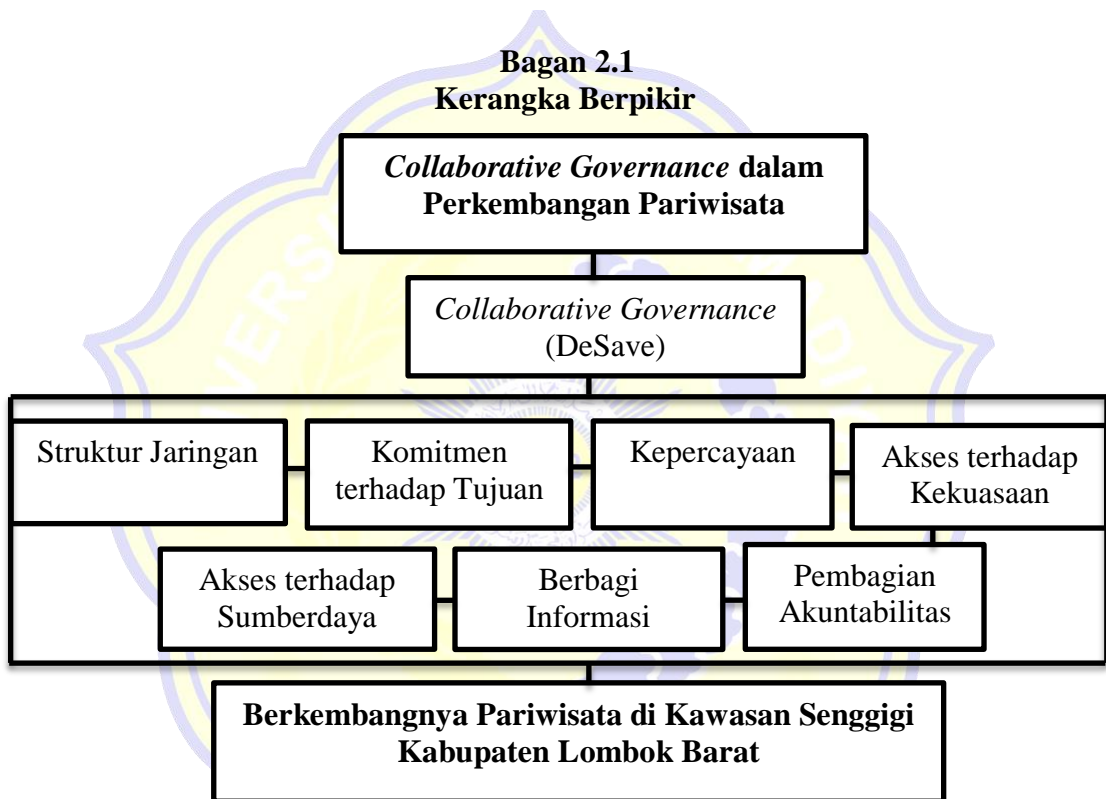
Untuk merencanakan kemajuan pariwisata di daerah tertentu, ada beberapa tindakan yang dapat diambil seperti:

- a. Dalam huruf ini, kami akan mencoba untuk mengubah kata-kata dalam teks berikut ini: a. Pembangunan dan atraksi wisata melibatkan perencanaan, penggunaan, dan pengendalian yang saling terkait. Oleh karena itu, pengembangan objek dan daya tarik wisata harus disesuaikan dengan sistem perencanaan yang ada.
- b. Pembangunan dan penguatan atraksi pariwisata dilakukan dengan mengikuti pendekatan pengembangan Area Pariwisata yang

mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, estetika, dan moral yang dianut oleh penduduk setempat.

2.3. Kerangka Berfikir

Dalam konsep ini, kita akan mengamati serta menghubungkan kerangka pemikiran dengan variabel yang menggambarkan keberhasilan teori tersebut.



Sumber: (Deseve G, 2009)

2.4. Definisi Konseptual

Berdasarkan Singarimbun dan Effendi (2001), pengertian konseptual ialah interpretasi dari konsep yang dipakai agar mempermudah peneliti dalam menerapkan konsep tersebut dalam praktek. Definisi konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan seperti berikut ini:

1. *Collaborative governance* merupakan upaya atau tanggapan dari pemerintah dalam mengatasi isu-isu publik, mengelola administrasi pemerintahan, dan melaksanakan program-program pemerintah lainnya, di mana pemerintah perlu bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat dan beberapa perusahaan lainnya menghadapi tantangan dan masalah yang rumit dalam menjalankan program dan kegiatan mereka.
2. Berikutnya, untuk mengukur tata kelola kolaboratif, akan digunakan 7 (tujuh) poin sebagai pedoman, termasuk:
 - a. Struktur jaringan memiliki peran penting dalam memfasilitasi interaksi dan kerja sama antara individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya dan beroperasi secara independen, tersebar di berbagai wilayah geografis, dan memiliki perbedaan dalam konteks kerja mereka, yang meliputi pola budaya, sumber daya sosial, dan tujuan yang berbeda, tetapi mereka berkolaborasi untuk mencapai suatu target.
 - b. Komitmen terhadap tujuan adalah sebuah dedikasi yang dibangun oleh setiap individu atau pihak yang terlibat dalam kerjasama.

- c. Keyakinan, adalah kepercayaan yang diyakini oleh peserta bahwa mereka mempercayakan informasi atau usaha dari pihak-pihak lain dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.
 - d. Kemudahan untuk memperoleh kekuasaan, adalah ketersediaan aturan-aturan yang jelas dan diterima secara umum.
 - e. Pemisahan tanggung jawab, yaitu ketaatan dari anggota kerjasama terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama.
 - f. Mengedarkan pengetahuan, merupakan metode pengaturan (seperti metode peluasan pengetahuan dan peraturan pengambilan keputusan) dan kemampuan serta opsi mereka yang memimpin atau mengendalikan upaya kerjasama.
 - g. Mendapatkan akses ke sumber daya, termasuk tersedianya dana, keterampilan teknis, tenaga kerja, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk meraih hasil kerja sama.
3. Hambatan *collaborative governance* adalah setiap isu yang muncul ketika bekerja sama dalam proses kolaboratif. faktor yang menghambat progress dalam suatu hal tersebut, seperti beberapa halangan yang dapat menghambat kemajuan, seperti:
- a. Struktur social, muncul dikarenakan terdapat kecenderungan institusi untuk bekerjasama atau bekerjasama cenderung memanfaatkan sistem hierarkis dalam hubungannya dengan pihak lain yang terlibat.

- b. Kultural (budaya), ketergantungan budaya pada produsen dan ketidakberanian untuk mengambil risiko adalah penyebab utama dari fenomena ini.
 - c. Kurangnya inovasi dalam mencapai tujuan-tujuan disebabkan oleh adanya kepentingan politik yang berbeda di antara pemangku kolaborasi, yang mengurangi kepentingan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.
4. Peningkatan pariwisata merupakan upaya memperbaiki atau menambah sarana dan prasarana serta layanan yang diperlukan oleh pengunjung agar merasa betah selama berada di destinasi wisata.

2.5. Definisi Operasional

Operasional adalah istilah yang merujuk pada proses penentuan unsur-unsur yang dapat diukur serta pedoman yang akan digunakan oleh peneliti saat menjalankan studi di lapangan untuk memahami aspek yang akan diteliti di masa mendatang. Definisi operasional dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Definisi Operasional Collaborative Governance

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	<i>Collaborative Governance</i>	Struktur Jaringan	Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang terjalin secara sinergis.
		Komitmen terhadap tujuan	a. Terdapat tujuan yang sama yang ingin dicapai. b. Kesepahaman di antara aktor-aktor kolaborasi adalah kunci utama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.

	Kepercayaan	Adanya perasaan keyakinan yang tercipta di antara pihak-pihak yang bekerjasama.
	Akses terhadap kekuasaan	Adanya standar yang telah ditetapkan dengan jelas dan widely accepted, termasuk ukuran dan ketentuan prosedur.
	Pembagian akuntabilitas	Anggota kolaborasi patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditegaskan dan disetujui bersama.
	Berbagi informasi	Keterdapatannya mekanisme koordinasi mencakup pengurangan info dan pembuatan regulasi keputusan.
	Akses terhadap sumber daya	a. Tersedianya sumber daya manusia b. Tersedianya sumber daya finansial c. Tersedianya sumber daya sarana dan prasarana

Sumber: Diolah oleh penulis, 2022.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian biasanya didefinisikan sebagai suatu prosedur ilmiah yang dijalankan secara berturut-turut dengan memulai pemilihan isu, mengumpulkan informasi, dan menganalisis informasi, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topik, fenomena, atau isu spesifik (Suryana, 2010). Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang direncanakan, terorganisir, teratur, dan memiliki tujuan tertentu, baik dalam praktik maupun teori (Anggito & Setiawan, 2008).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan permasalahan yang ada dan tujuan yang ingin dicapai. Ini sesuai dengan maksud riset yakni menginvestigasi suatu peristiwa dan fenomena sosial yang terjadi secara nyata dan tak dapat disangkal. Dengan menggunakan teknik penelitian ini, diinginkan agar seorang peneliti dapat mencapai hasil yang signifikan dan dapat dipercaya dengan menghimpun, menyimpulkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi data (Anggito, 2018).

Pemanfaatan metode kualitatif bukanlah peristiwa baru, namun dalam penyelidikan suatu permasalahan akan menghasilkan hasil yang lebih baik ketika menggunakan metode kualitatif. Apabila menggunakan metode kuantitatif, tidak mungkin mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah proses kerja, pertumbuhan suatu aktivitas, penjelasan yang terperinci, keyakinan, dan nilai-nilai budaya yang dipegang (Saleh, 2017).

Penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan, dimana dilakukan di lingkungan kehidupan yang nyata. Penelitian ini adalah deskriptif, yang berarti memaparkan dengan tepat karakteristik individu, fenomena, kondisi, dalam konteks kelompok yang spesifik atau untuk mengevaluasi sejauh mana terjadinya koneksi tertentu dari sebuah fenomena dalam masyarakat.

Dalam riset ini, kami menggunakan metode kualitatif atau riset naturalistik dikarenakan data yang kami kumpulkan bersifat kualitatif dan bukan kuantitatif. Penggunaan instrumen pengukuran juga tidak diperlukan dan tidak diterapkan. Penelitian ini dikenal sebagai naturalistik karena dilakukan dengan cara yang alami atau normal, sesuai dengan keadaannya sendiri, tanpa disesuaikan (Raco, 2018).

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian tersebut dilakukan di daerah Senggigi Kabupaten Lombok Barat dengan alamat di Jalan. Raya Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, wilayah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama sekitar dua bulan pada periode Januari-Februari tahun 2022.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber pengetahuan merupakan segala sesuatu yang menjelaskan tentang asal-muasal informasi yang diperoleh. Pada penelitian ini, terdapat dua sumber informasi yang digunakan dengan memanfaatkan dua jenis data yang berbeda, yakni:

1) Sumber data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian yang menjadi sumber data utama. Informasi utama dapat diperoleh melalui dokumentasi tertulis atau melalui rekaman video/audio, serta dengan mengambil foto, ataupun rekaman visual (Moleong, 2007). Teks ini dapat diparafrasakan menjadi: Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terhadap individu-individu yang menjadi fokus penelitian.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder merujuk kepada informasi yang diperoleh dari sumber lain setelah sumber utama yang dapat digunakan sebagai pendukung data asli dari sumber utama. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui referensi buku penelitian, arsip, dan dokumen yang terdapat dalam dokumen lapangan.

3.5. Teknik Penentuan Narasumber

Teknik menentukan dalam penelitian ini, partisipan atau subjek pengamatan dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yang merupakan metode penyeleksian sampel berdasarkan pertimbangan khusus yang berkaitan dengan studi kasus yang sedang diteliti serta tujuan penelitiannya (Sugiyono, 2016). Para sumber informasi pada penelitian ini, terdapat tiga kelompok yang terlibat, yaitu instansi pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pemilihan narasumber ini

berdasarkan pada teori collaborative governance yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat dan faktor-faktor yang menghambat perkembangan industri pariwisata di Kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, terus mengalami peningkatan. Informasi yang diterima dari sumber tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan dalam mengkaji masalah yang ingin diinvestigasi.

Berdasarkan metode identifikasi sumber informasi yang sudah disebutkan sebelumnya, maka partisipan dalam kajian ini terdiri dari:

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No.	Instansi/Organisasi	Narasumber	Jumlah
Pemerintah			
1.	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat	a. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat	1 Orang
		b. Kabag Pengembangan SDM Kepariwisata	1 Orang
		c. Kasi Kerjasama dan Kemitraan Sumber Daya Manusia	1 Orang
Swasta			
2.	Senggigi Hotel Association	a. Ketua Senggigi Hotel Association	1 Orang
		b. Anggota Senggigi Hotel Association	1 Orang
Kelompok Masyarakat			
3.	Pokdarwis Senteluk	a. Ketua Pokdarwis Senteluk	1 Orang
		b. Anggota Podarwis Senteluk	1 Orang
4.	Masyarakat	a. Masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Senggigi	6 Orang
		b. Masyarakat yang berkunjung ke Kawasan Senggigi	10 Orang
Total			23 Orang

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terdapat tiga metode yang digunakan, yakni:

1) Observasi

Menurut Sugiyono (2012) Proses observasi dapat dikatakan sebagai proses yang rumit dan tidak mudah. Proses ini melibatkan sejumlah proses biologis dan psikologis, secara khusus melalui observasi, mengingat, dan mencatat informasi dalam catatan lapangan, yang menjadi hal esensial. Observasi dilaksanakan dengan mengamati kerja sama yang dilakukan oleh berbagai organisasi, seperti lembaga pemerintah, seperti Dinas Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, pelaku bisnis seperti penyedia akomodasi penginapan, dan lain-lain, serta warga yang tinggal dan melakukan kegiatan di wilayah penelitian, khususnya di Kawasan Senggigi.

2) Wawancara

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak formal dalam proses pengumpulan data. Dalam wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat wawancara dilakukan. Wawancara tidak terstruktur sering kali juga dikenal sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, serta wawancara terbuka (interview dengan pertanyaan terbuka). Tujuan dari proses pengumpulan informasi dengan metode ini adalah untuk mendapatkan data yang ditetapkan.

3) Dokumentasi

Metode pencatatan merupakan metode pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh informasi melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian atau proses mencari data tentang berbagai aspek atau variabel menggunakan catatan, salinan tulisan lisan, literatur, atau berita, jurnal, dokumen kuno, daftar, risalah, agenda rapat, dan sejenisnya. Menurut Arikunto (2001), Oleh karena itu, seorang peneliti dapat mengambil kesimpulan dari dokumen-dokumen yang relevan dengan subjek dan tujuan penelitian melalui cara mengambil kutipan dari sumber yang sudah ada.

3.7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif. Sehingga, analisis yang dilakukan bersifat deduktif dan menggambarkan. Analisis dimulai dengan menganalisis dan meneliti sumber informasi, entah itu berasal dari wawancara atau observasi yang tercatat dalam catatan lapangan, serta menginterpretasikan data tersebut (Moleong, 2007). Dari penjelasan informasi di atas, langkah-langkah untuk menganalisis data pada penelitian ini meliputi tiga fase, yaitu:

- 1) Reduksi data merupakan tahap untuk memilih, mengumpulkan, fokus, dan menyederhanakan data kasar yang diperoleh dari lapangan.
- 2) Penyajian data adalah proses pengaturan sekelompok pernyataan informasi menjadi konsep logis berdasarkan fakta yang ada, sehingga memungkinkan untuk membuat kesimpulan.

- 3) Peneliti merumuskan kesimpulan dengan melakukan verifikasi ulang informasi yang diperoleh, mulai dari pengamatan, interaksi, dan pencatatan dokumen. Lalu, menyimpulkan secara umum dengan membandingkan fakta dan konsep yang diperoleh berdasarkan laporan penelitian yang telah dilaksanakan.

